

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampai saat ini, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) masih merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menopang sektor ekonomi Indonesia. Menurut Bank Indonesia, UMKM mempunyai peran strategis dalam membangun perekonomian Indonesia yaitu jumlah unit UMKM yang besar dan terdapat pada setiap sektor ekonomi menciptakan lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja, serta UMKM memiliki kemampuan untuk mengolah bahan baku lokal dan menciptakan produk barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga yang terjangkau.

Hal ini terbukti dari kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja serta ekspor yang cukup besar. Tercatat pada tahun 2018, kontribusi sektor UMKM terhadap PDB terus meningkat menjadi sebesar 61,07%. Kontribusi sektor UMKM terhadap penyerapan total tenaga kerja juga tinggi, yaitu sebesar 97%. Selain itu, kontribusi sektor UMKM terhadap total ekspor non migas mencapai 14,37%.

Pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah, dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia. Mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa. Jumlah UMKM pada tahun 2018 tercatat mencapai 64,195 juta unit usaha. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 116,98 juta orang pada tahun 2018 seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Kontribusi UMKM terhadap ekonomi Indonesia (2017-2018)

Indikator	Satuan	2017		2018	
		Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah
UMKM	Unit	99,99	62.922.617	99,99	64.194.57
Tenaga kerja	Orang	96,82	116.431.224	97,00	116.978.631
PDB	Rp milyar	60,90	7.820.282,600	61,07	8.573.895.300,00
Ekspor non migas	Rp milyar	14,54	301.629.800,00	14,37	293.836.900,00

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indonesia (2017-2018) (diolah).

Selain memberikan sumbangsih yang besar terhadap perekonomian Indonesia, UMKM juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan maupun kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia, karena sektor ini mempunyai ketahanan ekonomi yang tinggi. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan.



Di balik perannya dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia terdapat berbagai masalah yang terjadi pada UMKM. Salah satunya yaitu UMKM sulit untuk mendapatkan kredit perbankan karena Lembaga Bank menilai bahwa UMKM tidak memiliki kelayakan kredit atau *bankable* walaupun memiliki kelayakan bisnis atau *feasible*. Ketidakpastian UMKM dalam menjalankan bisnis di masa depan dan kurangnya sistem manajemen keuangan pada UMKM juga menjadi salah satu faktor sulitnya untuk mendapatkan kredit perbankan. Melihat dari sisi masalah tersebut pemerintah menciptakan salah satu program untuk membangun dan meningkatkan akses pembiayaan UMKM yaitu Kredit Usaha Rakyat yang dikeluarkan pada bulan November tahun 2007.

Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Permenko) Nomor 8 Tahun 2019 Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan atau agunan tambahan belum cukup. Tujuan pemerintah dalam menciptakan KUR yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penerapan tenaga kerja (Permenko No 8 Tahun 2019 Pasal 2a). Program KUR memiliki penyalur KUR yaitu lembaga keuangan yang telah diseleksi oleh pemerintah sehingga memenuhi syarat untuk menyalurkan KUR. Total lembaga keuangan yang diberikan mandat oleh pemerintah untuk menyalurkan KUR yaitu 44 lembaga keuangan bank baik negeri maupun swasta dan lembaga keuangan non bank. Jenis KUR yang disalurkan oleh penyalur KUR yaitu KUR mikro, KUR kecil, KUR TKI (Tenaga Kerja Indonesia), dan KUR khusus.

Dalam pelaksanaannya penyalur KUR untuk usaha produktif tidak dapat dilepaskan dari kontribusi lembaga penjamin atau penjamin KUR, mengingat KUR merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif. Secara khusus bagi UMKM karena KUR dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan UMKM untuk mendapatkan akses permodalan karena UMKM tidak memiliki cukup agunan. Oleh karena itu, terdapat lembaga penjamin yang dapat menjamin UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat yang secara langsung diberikan penugasan khusus penjaminan program KUR oleh pemerintah yaitu Perusahaan Perseroan Jaminan Kredit Indonesia atau PT Jamkrindo (Persero) dan salah satu perusahaan asuransi milik negara yang kembali ditunjuk pemerintah untuk menjaminkan KUR.

Menurut berita yang dilansir oleh Jawa Pos pada Juni 2018, porsi penjaminan KUR kedua perusahaan tersebut yaitu sekitar 55% dari total penyediaan KUR yang diberikan oleh pemerintah merupakan bagian dari penjaminan PT Jamkrindo (Persero), sedangkan 45% sisanya merupakan bagian dari perusahaan pesaing. Bagi PT Jamkrindo (Persero), perusahaan pesaing tersebut dapat menghilangkan peluang bagi PT Jamkrindo (Persero) dalam memperluas pasar. Pada tahun 2018 PT Jamkrindo (Persero) mengalami penurunan jumlah debitur akibat dari munculnya pesaing. Jumlah debitur PT Jamkrindo (Persero) pada tahun 2018 jumlah debitur yang dijamin yaitu 1.982.984 debitur, sedangkan pada Tahun 2017 2.228.828 debitur yang artinya terjadi penurunan 12,4% jumlah debitur KUR terjamin perusahaan. PT Jamkrindo juga mengalami penurunan volume penjaminan KUR dan penurunan pendapatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.

2. Dilarang mengemukakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.

atau imbal jasa penjaminan untuk produk KUR pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Adapun penurunan volume penjaminan KUR dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Volume penjaminan dan IJP KUR PT Jamkrindo (Persero) (2017-2019)

Tahun	Volume penjaminan KUR (Rp)	IJP KUR (Rp)
2017	35.333.460.584.515,00	1.377.289.463.522,00
2018	33.355.783.670.928,00	1.003.864.336.258,00
2019	34.107.487.441.644,00	1.278.903.988.285,00

Sumber : PT Jamkrindo (Persero)

Pada Tabel 2 dapat dilihat pada tahun 2017 hingga tahun 2019 perusahaan mengalami penurunan volume penjaminan untuk produk KUR yang berdampak pada penurunan pendapatan atau imbal jasa penjaminan yang diterima oleh perusahaan, walaupun pada tahun 2019 volume penjaminan dan IJP meningkat namun persentase peningkatannya sangat kecil. PT Jamkrindo (Persero) juga belum melakukan pelayanan secara profesional dengan mengikuti *trend* pasar yang berkembang yang sudah dilakukan oleh perusahaan lain karena perusahaan belum melakukan pelayanan pemasaran yang sesuai *trend* perusahaan lain, sehingga perusahaan tersebut melakukan budaya pemasaran dan pelayanan yang sama setiap tahunnya.

Dalam menanggapi hal tersebut, munculnya pesaing bagi perusahaan dalam menjamin KUR diperlukan adanya *maintenance* dan upaya pemasaran kepada mitra usaha, yaitu lembaga keuangan penyalur KUR agar setiap lembaga keuangan menjamin debitur KUR kepada PT Jamkrindo (Persero) melalui upaya pemasaran produk KUR agar PT Jamkrindo (Persero) terus dapat menguasai pasar dengan penambahan jumlah debitur KUR yang dijamin oleh PT Jamkrindo (Persero) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Jumlah UMKM di Indonesia hingga saat ini yaitu sebanyak 64.194.570 unit UMKM, sedangkan jumlah UMKM yang telah mengikuti program KUR hanya sekitar 31% dari jumlah UMKM atau sebanyak 20.085.942 unit UMKM, sehingga jumlah UMKM yang belum mengikuti program KUR yaitu sebanyak 44.108.628 unit UMKM. Menurut Survei Nasional Saiful Mujani *Research and Consulting* (SRMC) sebanyak 48% UMKM di Indonesia masih kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan. Hasil data survei tersebut diartikan masih terdapat sekitar 21.172.141 UMKM sulit untuk mendapatkan modal.

Upaya untuk memperluas pasar dengan melakukan pemasaran yang tepat karena masih banyak UMKM yang belum mengikuti program KUR. Strategi pemasaran akan dilakukan oleh PT Jamkrindo (Persero) untuk menjadi pilihan utama bagi mitra usaha dalam meningkatkan penjaminan KUR sehingga volume penjaminan produk KUR akan meningkat, ditambah dengan adanya kebijakan dari pemerintah tentang target penyaluran KUR. Pemerintah membuat kebijakan melalui Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM yang telah menetapkan kebijakan strategis untuk program KUR tahun 2020 hingga tahun 2024 dalam rangka peningkatan target penyaluran KUR yang akan ditingkatkan hingga Rp325 T.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Peningkatan penyaluran KUR tersebut dapat dijadikan sebagai peluang untuk dapat meningkatkan target volume penjaminan KUR dengan menjaga hubungan dengan mitra usaha melalui strategi pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan yaitu meningkatkan kualitas layanan pada produk KUR pada setiap mitra usaha untuk menjaga loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Tidak adanya *switching value* pada usaha penjaminan KUR membuat perusahaan memilih strategi pemasaran yang akan menjaga hubungan baik dengan mitra agar memilih PT Jamkrindo (Persero) menjadi pilihan utama bagi lembaga keuangan penyalur KUR untuk melakukan penjaminan KUR. Peningkatan target volume penyaluran KUR yang dibuat pemerintah dan jumlah UMKM yang masih kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan maka perusahaan harus melakukan upaya pemasaran dengan mitra usaha penyalur KUR dan UMKM. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat kepada mitra usaha penyalur KUR perusahaan dan juga melakukan pemasaran terhadap lembaga keuangan yang belum melakukan kerja sama dengan perusahaan, sehingga perusahaan PT Jamkrindo (Persero) menjadi pilihan utama bagi Lembaga Keuangan penyalur KUR dalam menjamin debturnya.



1.2 Tujuan

Sekolah Vokasi

College of Vocational Studies

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari kajian pengembangan bisnis ini adalah :

1. Merumuskan ide pengembangan bisnis berdasarkan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal perusahaan pada PT Jamkrindo (Persero) Jakarta Pusat.
2. Menyusun perencanaan pengembangan bisnis pada PT Jamkrindo (Persero) Jakarta Pusat berdasarkan aspek non finansial dan aspek finansial.

2. METODE KAJIAN PENGEMBANGAN BISNIS

2.1 Lokasi dan Waktu

Penyusunan kajian pengembangan bisnis ini berdasarkan hasil melakukan praktik kerja lapang (PKL) di kantor Pusat PT Jamkrindo (Persero) yang berlokasi di Gedung Angkasa B-9 Kavling 6 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat. Waktu PKL dilakukan selama dua minggu yang dimulai dari tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, kemudia PKL dilanjutkan secara *work from home* atau *online* selama dua bulan dua minggu dimulai dari tanggal 26 Maret 2020 sampai 03 Juni 2020.